



sudah diolah, dimaknai ulang, dan diperkaya oleh ideologi Islamisme, sehingga artikulasi dan gerakan-gerakannya menunjukkan ciri-ciri yang melekat pada kalangan Islamis-politis.

Di dalam tipe ini terdapat tiga sub-tipe, yaitu tradisional-Islamis ideologis, tradisional-Islamis pragmatis, dan tradisional-Islamis naif. Sub-tipe pertama (tradisional-Islamis ideologis) merujuk kepada pemikiran dan/atau gerakan keislaman yang tetap berpijak pada ajaran-ajaran keislaman ulama klasik, tapi pada saat yang sama juga mengadopsi ideologi keislaman kelompok Islamis. Sub-tipe kedua (tradisional-Islamis pragmatis) merujuk pada pemikiran dan/atau gerakan keislaman yang tetap berpijak pada ajaran-ajaran keislaman ulama klasik, tapi pada saat yang sama memanfaatkan agenda-agenda politik kelompok Islamis karena dianggap menguntungkan. Sub-tipe ketiga (tradisional-Islamis naif) merujuk kepada pemikiran dan/atau gerakan keislaman yang tetap berpijak pada ajaran-ajaran keislaman ulama klasik, tapi mengalami kebingungan ketika bersentuhan dengan ideologi Islamisme.

3. Gerakan yang terlihat paling jelas pada kelompok Islam tradisional-Islamis Bangkalan adalah upayanya dalam menyantirkan Bangkalan. Gerakan ini dilakukan dengan cara mendesak penguasa untuk menformalkan beberapa norma dan praktik kesantrian yang selama ini menjadi tema dakwah para kiai. Dalam mendesak negara ini, setidaknya ada dua strategi gerakan yang mereka lakukan, yaitu merevitalisasi lembaga-lembaga keislaman tradisional yang sudah ada atau membentuk organ baru yang dianggap lebih efektif. Sekalipun



dianggap saling berhadapan: moderat versus radikal. Salah satu buku yang mengulas tentang gerakan Islam radikal pasca-jatuhnya Soeharto ditulis oleh Zachary Abuza.<sup>4</sup> Dalam enam bab yang digunakannya untuk menjelaskan munculnya fenomena baru gerakan Islam Indonesia pasca-Reformasi, dia sangat fokus pada kelompok-kelompok Islamis yang dianggapnya menandai munculnya radikalisme Islam Indonesia tanpa memberi ulasan di mana posisi Muslim tradisional dalam arah baru Islam Indonesia ini. Perspektif yang sama juga digunakan dalam proyek penelitian unggulan LIPI tentang peta gerakan Islam radikal di Indonesia.<sup>5</sup> Cara pandang ini tampak sangat jelas dalam tulisan Al-Chaidar tentang pemetaan Islam radikal dan fundamentalis di Indonesia.<sup>6</sup>

Fakta di lapangan menginformasikan data yang lebih kaya dan bernuansa daripada sekadar pandangan yang sederhana itu. Sejauh membicarakan ulama tradisional, dalam situasi Indonesia yang sangat terbuka seperti saat ini, hampir tidak mungkin untuk meletakkan mereka semata-mata ke dalam kategori kiai pesantren yang setiap saat bergulat dengan fiqh tanpa terlibat dengan tuntutan-tuntutan politik. Alih-alih membuat pembedaan yang tegas antara moderat dan radikal, di mana yang Muslim tradisional dipandang sebagai representasi yang pertama dan kelompok Islamis sebagai yang terakhir, ada

---

<sup>4</sup> Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia* (London dan New York: Routledge, 2007); Bandingkan dengan Robert W. Hefner, "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia", dalam Robert W. Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005); Jamhari dan Jajang Jahroni (eds.), *Gerakan Salafit Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>5</sup> Afadlal, dkk. *Gerakan Radikal Islam di Indonesia dalam Konteks Terorisme Internasional: Pemetaan Ideologi Gerakan Radikal Islam Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2003).

<sup>6</sup> Al-Chaidar, *Pemetaan Kelompok Islam Radikal dan Islam Fundamentalis di Indonesia* (Paper--Universitas Malikusslaeh Aceh, t.th).



(tradisionalis-legalis, puritanis-teologis, ekstremis-militan, Islamis-politis, modernis-klasik, ijtihadis-progresif, liberal-sekular, dan nominalis-kultural), gerakan keislaman para kiai tradisional Bangkalan lebih tepat disebut sebagai tradisionalis-Islamis. Tipe ini menggambarkan sebuah gerakan keislaman yang basis ideologinya tetap berpijak pada ajaran-ajaran keislaman ulama klasik (sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab keislaman pesantren), namun karakter gerakannya menunjukkan ciri-ciri sebagaimana yang selama ini menempel pada kalangan Islamis-politis.

Sampai titik ini, perlu juga melihat pandangan yang banyak berlaku selama ini bahwa ulama tradisional pada dasarnya adalah apolitis. Betulkah ulama tradisional berkarakter apolitis? Kajian Qasim Zaman tentang ulama dianggap sebagai kajian paling mutakhir yang cukup representatif tentang ulama tradisional di abad ke-21.<sup>9</sup> Dalam kajiannya ini, Zaman memperhadapkan ulama tradisional dengan kelompok Islamis dalam hal karakter gerakan. Menurutnya, salah satu karakteristik penting dari ulama tradisional adalah keinginan yang kuat untuk melindungi warisan-warisan pengetahuan Islam klasik tanpa ada keinginan untuk menjadikannya sebagai ideologi bagi gerakan politik. Karakter ulama tradisional tersebut berbeda dengan kelompok Islamis yang merupakan *Muslim activist*, yang berjuang secara politis dengan menjad Islam sebagai ideologi gerakannya.

---

<sup>9</sup> Muhammad Qasim Zaman, *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change* (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2002); Idem, "Pluralism, Democracy, and The Ulama", dalam Robert W. Hefner, *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2005).

Dalam melakukan tipologisasi atas berbagai gerakan Islam kontemporer, Saeed juga menyuarakan hal yang sama.<sup>10</sup> Kepentingan utama dari ulama tradisional (legalis tradisional) adalah menjaga hukum-hukum fiqh yang telah disusun oleh para imam mazhab. Sementara, kelompok Islamis memiliki ketertarikan pada politik yang sangat kuat dengan berjuang untuk mendirikan negara Islam atau membangun sebuah tata sosial-politik Islam bagi kaum Muslim.

Mungkin bisa dibenarkan jika yang dirujuk adalah para kiai kecil di kampung-kampung. Namun, sejarah ulama di dunia Islam, jika menyangkut ulama-ulama yang memiliki pengaruh besar, seringkali berupa narasi hubungan antara ulama dengan politik kekuasaan, baik oposisi maupun pendukung. Keterkaitan ulama dengan politik bisa saja karena tarikan pihak penguasa, namun tanggung jawab ulama atas masyarakat juga seringkali membawanya ke dalam dunia politik.

Ulama selalu merasa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membimbing masyarakat. Sekalipun melakukan amar makruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi semua Muslim, namun ulama merasa dan diposisikan secara sosial sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena pengetahuannya dalam masalah-asalah agama. Tugas amar makruf nahi munkar inilah yang pada waktu tertentu membawa ulama masuk ke dalam dunia politik untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempts at a Classification", *The Muslim World*, Vol. 97 (Juli 2007).

<sup>11</sup> Arnold H. Green, "Political Attitudes and Activities of the Ulama in the Liberal Age: Tunisia as an Exceptional Case", dalam Abubaker A. Bagader (ed.), *The Ulama in the Modern Muslim*







perlu diingat bahwa antarkabupaten di Pulau Madura bisa memiliki perkembangannya sendiri-sendiri yang unik. Konflik kekerasan antara Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang, misalnya, ternyata tidak terjadi di kabupaten lain meskipun terdapat komunitas Syiah. Di Bangkalan hal ini bisa diselesaikan melalui dialog yang difasilitasi oleh pemerintah. Sementara, Kabupaten Sumenep bisa dikatakan sama sekali tidak muncul tuntutan formalisasi shari'ah Islam sekalipun di sana terdapat kiai-kiai yang telah menyerap ideologi Islamisme dan beberapa tokoh-tokoh Islamis-radikal dari luar juga datang dan memberi pengajian.

Sekalipun beberapa data dalam studi ini sudah dikumpulkan sejak tahun 2011, namun pengumpulan data untuk penelitian ini secara intens baru dilakukan pada akhir tahun 2014. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulis membuat beberapa informan kunci tidak bisa ditemui, baik karena kesibukan si informan maupun karena waktu yang sudah tidak memungkinkan.

Bab tiga yang mengulas tentang Islam Madura dan Bangkalan secara khusus ditulis dengan karakter penulisan etnografis. Idealnya, data-data yang digunakan di bagian ini dikumpulkan dengan metode pengamatan terlibat (*participant observation*) sehingga peneliti bisa memandang dunia subjek penelitiannya dari sudut pandang *insider*. Namun, data-data yang digunakan dalam bagian ini sebagian besar adalah data-data hasil penelitian etnografi pihak lain. Ini adalah keterbatasan lain dari studi ini sekalipun alasan utama di samping keterbatasan waktu, juga karena fokus penelitian ini adalah ingin melihat pergeseran wacana dan gerakan Islam tradisional Bangkalan pasca-Reformasi, di

